



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Bab. 2

BIAS STRATEGI



TERURUK DAN TERPURUK?

KINERJA ekonomi Riau setahun terakhir tak kunjung membaik. Justeru kondisinya kian terpuruk. Data yang dilansir Bank Indonesia Cabang Pekanbaru dalam buku Kajian Ekonomi Regional Triwulan III seakan melegitimasi opini masyarakat bahwa segala pesta pora yang ditaja di bumi Lancang Kuning ini taklah membawa kebijakan pada kehidupan masyarakat. Gembor-gembor pembangunan hanyalah mimpi-mimpi manis yang dinabobokkan pada rakyat. Benda-benda fisik sebagai “berhala modern” tidak signifikan mengungkit rakyat dari penderitaan dan jerit kemiskinan. Program pembangunan yang menghamburkan dana berlimpah bukannya membuat rakyat kian sejahtera. Malah kehidupan mereka kian terampas oleh tangan-tangan kapitalis yang mampu menyuap dan melenakan pengusaha yang seharusnya berperan sebagai wasit yang adil.

Perumbuhan ekonomi Riau tanpa Migas pada Triwulan III 2008 masih tumbuh 8,54 persen, namun pada Triwulan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



7 turun menjadi 7,18 persen. Sedangkan pada Triwulan III 2009 kian terpuruk sehingga hanya mampu tumbuh 5,52 persen. Statement para pejabat yang merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Riau masih di atas rerata nasional memang tidak bisa dibantah, tetapi sejak Riau ini ada keadaan demikian sudah lazim terjadi. Persoalannya bukan terletak pada tingginya tingkat pertumbuhan, tetapi lebih pada efek pemerataan dan akhir-akhir ini makin menukik pada kemerosotan yang menahun. Artinya disamping kualitas pertumbuhan ekonomi yang tidak baik kini didera pula oleh kinerja yang kian memburuk.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi Riau dari sisi pertumbuhan banyak dipicu oleh merosotnya konsumsi pemerintah, rendahnya investasi dan kinerja ekspor yang menurun. Pada triwulan I 2008 tingkat pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 8,88 persen sedangkan triwulan ketiga 2009 hanya 8,88 persen. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah sebagai stimulan tidak berjalan secara signifikan dan bahkan menimbulkan efek negatif pada kinerja perekonomian.

Terlalu pagi memang untuk mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah di Riau telah gagal karena bagaimanapun tingkat pertumbuhan itu masih relatif tinggi. Hanya saja tidak berlebihan kiranya bila dikatakan bahwa sentuhan pemerintah dengan sumberdaya ekonomi yang berlimpah belum banyak mendorong kreativitas dan produktivitas masyarakat. Artinya, masih sangat dibutuhkan program-program pembangunan yang lebih menyentuh dan mampu mengungkit perekonomian daerah. Kuncinya sangat tergantung pada perencanaan pembangunan yang tepat

EDYANUS HERMAN HALIM



asasan, pengelolaan yang transparan dan bersih serta pengawasan yang berkesinambungan. Termasuk pula upaya-upaya penguatan partisipasi publik yang pada akhir-akhir ini kian merkekan dan terasa kering.

Sinyalemen diatas dapat diperkuat bila diamati data pertumbuhan investasi dan ekspor. Investasi yang ditandai dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) non migas melorot sangat tajam dari 10,14 persen pada triwulan ketiga 2008 menjadi hanya 4,23 persen pada Triwulan III 2009. Hal inilah yang mulai mengindikasikan persoalan krusial dalam ketenagakerjaan bila pertumbuhan investasi tidak membaik. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tentunya menimbulkan konsekwensi pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi. Apalagi sumber pertumbuhan penduduk banyak disumbangkan oleh migrasi. Bila investasi tak memadai maka pengangguran akan membengkak dan beban hidup per penduduk kian tinggi. Ditambah dengan angka inflasi yang tinggi maka tingkat kesengsaraan rakyat Riau tentunya makin menghimpit.

Berharap pada ekspor non migas nampaknya juga tidak memadai. Selain porsi ekspor yang lebih banyak dikuasai para konglomerat kinerjanya pun sama memburuknya. Pertumbuhan ekspor pada Triwulan III 2008 adalah sebesar 8,15 persen sedangkan pada Triwulan III 2009 terpelanting ke tingkat pertumbuhan yang hanya sebesar 1,05 persen. Walau ada gejala akan membaik, khususnya untuk komoditas CPO namun karena struktur pasarnya sangat oligopsoni maka nilai tambahnya lebih mencurah pada kelompok hilir. Sedangkan di hulu (petani) tetap saja dihadapkan pada rendahnya harga TBS, lanka dan mahalanya pupuk, serta perilaku pasar dari



lah rentenir dan cukong yang amat mencekik. Hal ini semakin nyata bila diamati tingkat pertumbuhan ekonomi dari aspek penawaran secara sektoral. Sektor pertanian yang pada triwulan ketiga 2008 mampu tumbuh sebesar 5,74 persen maka pada triwulan yang sama tahun 2009 tinggal 2,25 persen. Petani nampaknya makin tak produktif dan tentunya kehidupan mereka kian sengsara.

Makin merosotnya kinerja perekonomian Riau juga dapat diamati oleh kian melemahnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan. Bila pada triwulan ketiga tahun 2008 sektor industri mampu tumbuh sebesar 7,88 persen maka pada triwulan ketiga tahun 2009 hanya sebesar 3,60 persen. Riau nampaknya tak mampu memacu dinamika industri khususnya dalam menumbuhkan industri hilir produk-produk unggulan rakyat. Pembangunan infrastruktur yang selama ini memakan dana yang sangat besar ternyata tidak mendorong berkembangnya industri-industri manufaktur yang mampu menjadi substitusi bagi sektor-sektor pertambangan yang tak terbaharukan dan sangat mememarkan lingkungan. Sektor perdagangan bahkan juga turut terimbas dimana pada triwulan ketiga 2008 tumbuh sebesar 10,5 persen maka pada triwulan yang sama tahun 2009 hanya tumbuh 9,37 persen.

Tentunya tidak pada tempatnya untuk bertanya siapa yang salah dengan keadaan yang kian tak mentereng tersebut. Bahkan untuk menanyakan apa yang salah hingga muncul kinerja memburuk tersebut masih dapat menimbulkan sakwasangka politik yang tidak produktif. Paling mungkin yang dapat dilakukakan adalah ajakan untuk beurun rembuk agar

EDYANUS HERMAN HALIM



pembangunan di Riau ini makin dipertajam, baik dari aspek perencanaan sehingga sasaran dapat kian dipertepat dan aspek pengelolaan yang lebih mencerminkan partisipasi publik yang transparan dan produktif. Dua tersebut akan memudahkan pengawasan sehingga proses dapat dipacu secara sinergis untuk mendapatkan kinerja yang optimal.

Upaya penghematan setiap rupiah yang dimiliki tak bisa lagi ditawarkan mengingat adanya indikasi resentralisasi Indonesia. Pengurangan DBH, DAU dan upaya-upaya pembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui legislatif, bukan pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana yang berlaku sekarang, adalah indikasi kongkrit krisauan pemerintahan pusat terhadap otonomi daerah yang kian melenceng dari harapan dan keinginan-keinginan pemuasan nafsu berkuasa pusat yang selama ini terpankaskan oleh desentralisasi.

Sudah saatnya di Riau dibentuk lembaga-lembaga pemikir yang secara rutin berdiskusi mencari akar permasalahan proses pembangunan, mengumpulkan data untuk memformulasikan isu-isu strategis dan merumuskan langkah-langkah kongkrit yang sinergis dan mengenai sasaran dalam menangani persoalan-persoalan daerah yang berkembang. Pemerintah Riau, baik provinsi maupun kabupaten kota tidak sepatutnya alergi terhadap kritik dan sumbangan pemikiran karena amat berisiko rasanya bila hanya mempercayakan pada eksekutif dan legislatif yang dihasilkan dari proses demokrasi yang kurang memadai untuk merumuskan kemana Riau akan dibawa dan dengan cara apa itu ditempuh. Para polisi yang duduk di legislatif maupun aparat birokrasi yang ditempatkan secara acak (kalau tidak boleh dikatakan



rampangan) dikhawatirkan hanya akan lebih banyak mengarahkan perhatiannya pada keberlangsungan kekuasaan-nya dan mengisi pundi-pundi uangnya yang sudah terkuras dalam kerangka menduduki jabatan yang saat ini berhasil ditempatinya.

Saat ini variabel eksternal kian menunjukkan gejala membaik. Bila Riau masih asyik dengan “pesta poranya” dan kurang peka mencermati dinamika makro ekonomi, baik nasional, regional dan internasional maka sekali lagi Riau akan kehilangan momentum. Riau tetap akan menjadi daerah perburuan bagi ekstraksi sumberdaya alam yang tak dibayar-bayar dan imbasnya hanyalah kerusakan lingkungan yang rakyat yang kian menderita akibat kehilangan mata pencaharian dan kesempatan mengenyam pendidikan yang lebih baik dan pelayanan kesehatan yang prima. Ekonomi global kian membaik dan pemulihan dari krisis makin nampak. Asia bahkan dicermati sebagai wilayah yang ekonominya makin memanas yang bila tak dikelola secara teliti dapat mendorong terjadinya inflasi yang justru bisa berakibat buruk.

Hal penting yang perlu disadari adalah kekeringan inovasi dan improvisasi serta partisipasi dalam pengelolaan pembangunan hanya akan melahirkan cara-cara tradisional yang tak teruji dan coba-coba. Risikonya sangat besar, yakni terbuangnya sumberdaya atau setidaknya menganggur-nya sumberdaya yang ada dan melencengnya jalan pem-bangunan yang ditapaki. Sisa anggaran pembangunan (SILPA) yang demikian besar merupakan salah satu bukti kongkrit dari perlunya kita terus berbenah.***

EDYANUS HERMAN HALIM



3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

MEMOLITISIR KESENGSARAAN RAKYAT

INDEKS kesengsaraan rakyat (*miseri index*) Indonesia yang kian melambung saat ini ramai dibicarakan, bahkan jadi komoditas politik untuk menyerang pemerintah yang berkuasa. Pada tahun 2004 sebagaimana dikemukakan Hendrawan Supratikno (*Antara News*: 28/01/2009) indeks kesengsaraan rakyat di Indonesia baru sebesar 15 persen sedangkan tahun 2008 naik menjadi 19 persen. Iman Sugema (*Republika Online*: 05/01/2009) malah mengatakan bahwa indeks kesengsaraan rakyat Indonesia tahun 2008 mencapai 20,3 persen.

Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga pada tahun 2008 angka ini memang memprihatinkan. Lihat saja negara jiran Malaysia indeks kesengsaraan rakyatnya hanya 8,9 persen, Thailand sebesar 6,9 persen dan Singapura sebesar 8,8 persen. Sedangkan India 15,1 persen, Pakistan 26,4 persen dan Turki 20,9 persen (*GO Jawa Pos*, 03/04/2009). Indonesia lebih baik dari Pakistan dan Turki tetapi sangat jauh tertinggal



diri negara-negara ASEAN. Hanya saja haruskah keadaan dipolitisi untuk kepentingan kekuasaan sementara rakyat tetap saja bergelimang kesengsaraannya ?

Apa itu IKR ?

Berkenaar dengan indeks kesengsaraan rakyat *atau misery index* sebagaimana dikutip dalam Mohammada Adri Putruman (*Internet:13/02/2009*) merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Prof Arthur Okun pada pertengahan tahun 1960-an. Konsep ini mempersatukan konsep pengangguran dan inflasi sebagai satu kesatuan yang dapat menjelaskan kesejahteraan masyarakat. Baik pengangguran maupun inflasi dipandang sebagai hal yang sangat menggerogoti kesejahteraan masyarakat sehingga memunculkan penderitaan rakyat. Walaupun masih dapat diperdebatkan, khususnya menyangkut inflasi dan kesempatan kerja, indeks ini memberi gambaran yang cukup memadai untuk menentukan keterpurukan kualitas hidup rakyat dalam kesehariannya.

Pengukuran indeks kesengsaraan rakyat dilakukan dengan menjumlahkan angka inflasi dengan angka tingkat pengangguran. Semakin tinggi indeks ini dimaknai sebagai semakin tertekan kehidupan masyarakat dan oleh karena itu dianggap sebagai kian sengsara. Naiknya inflasi mencerminkan lonjakan harga-harga pada berbagai jenis barang konsumsi, terutama bahan pangan dan non pangan. Masyarakat akan kian susah memenuhi kebutuhan pokoknya bila harga-harga naik. Jumlah barang yang diminta akan mengurucur karena pendapatan yang diterima tidak naik.

EDYANUS HERMAN HALIM



Kemampuan untuk membeli jadi melorot dan inilah yang menyebabkan rakyat kian tertekan, menderita dan sengsara.

Pada sisi lain tingginya angka pengangguran menunjukkan beban mereka yang bekerja juga kian berat. Mereka yang menganggur menjadi tanggungan yang bekerja. Penganggur tidak mampu mendatangkan uang bagi keluarga sehingga kebutuhan hidupnya ditanggung oleh orang yang bekerja dalam keluarga itu. Semakin besar angka pengangguran semakin rendah kualitas hidup masyarakat dan semakin sengsaralah mereka. Pada satu sisi, dengan pendapatan yang ada dan harus bagi untuk banyak orang, harga-harga melonjak pula sehingga kedua indikator ini dapat dijumlahkan untuk mengukur tingkat kesengsaraan masyarakat disuatu wilayah atau negara.

Di negara-negara berkembang biasanya terjadi paradigma dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Hal ini salah satunya dapat tercermin dari tingginya angka indeks kesengsaraan rakyat ini. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk dan jurang antara si kaya dan si miskin kian menganga. Tidak terjadi “*trickle-down economy*” atau mengalirnya manfaat ekonomi kesemua lini kehidupan rakyat melainkan semakin menaiknya sumber-sumber ekonomi itu ke lapisan atas dan orang-orang kaya (*trickle-up economy*) sehingga kue ekonomi yang tersisa untuk diperebutkan rakyat banyak kian mengecil dan nilai tambah yang dapat mereka nikmati sangat tidak memadai.

Indonesia mengalami persoalan tersebut sejak lama dan sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Ketergantungan pada pihak asing sangat besar. Hutang negara sudah



membebani rakyatnya 11,8 juta dolar AS per kepala. Sumber-caya alam yang dieksploitasi tak memberi kontribusi pada kesejahteraan rakyat. Bahkan investasi melahirkan over-coming import dan rakyat tertekan dengan naiknya harga barang akibat naiknya permintaan dari pekerja tambang dan pegawai perusahaan-perusahaan yang mengeksploitisir sumber alam tersebut. Belum lagi kerusakan lingkungan dan menyusutnya lahan untuk rakyat mengembangkan mata pencahariannya.

Bagaimana Riau ?

Indeks Kesengsaraan Rakyat Riau masih tinggi meskipun makin mengecil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 Indeks Kesengsaraan Rakyat Riau sebesar 27,02 persen dan tahun 2007 turun menjadi 19,55 persen serta tahun 2008 menciut lagi pada angka 16,41 persen. Tingginya angka indeks ini adalah akibat tingginya inflasi di Riau serta tingkat pengangguran. Selan dengan makin rendahnya angka inflasi dan menurunnya angka pengangguran dengan sendirinya tingkat kesengsaraan rakyat di Riau makin rendah pula.

Inflasi di Riau memang cenderung tinggi. Pada keadaan Februari 2006 angka inflasi mencapai 19,56 persen, Februari 2007 turun menjadi 9,55 persen sedangkan Februari 2008 turun lagi menjadi 7,06 persen. Sayangnya pada Februari 2009 naik lagi menjadi 8,31 persen. Fluktuasi angka inflasi di Riau banyak dipengaruhi oleh naik turunnya harga bahan makanan dan kebutuhan sekolah. Sebagian besar kebutuhan pangan Riau masih dipasok dari luar daerah, baik itu beras, gula, tepung, telur, minyak makan dan lain-lainnya. Hanya ayam potong yang produksinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat

EDYANUS HERMAN HALIM



daerah ini. Sedikit saja ada gangguan dalam transportasi dan produksi maka penyediaan bahan makanan di Riau akan terpengaruh. Produk di pasar menjadi langka dan harga langsung meroket. Sepanjang ketergantungan penyediaan bahan pokok ini masih besar pada luar daerah maka angka inflasi di Riau tak akan pernah rendah dan stabil.

Berkenaan dengan lapangan pekerjaan masih tergantung pada kemampuan menghadirkan investasi yang padat karya. Di Riau sektor perkebunan dan kehutanan memberi banyak peluang kerja. Hanya saja keberadaannya tidak dapat diperpanjang untuk jangka yang lebih panjang. Khusus untuk sub-sektor perkebunan masa depan bagi terbukanya lapangan pekerjaan hanya pada industri hilir. Pembukaan kebun-kebun baru tentunya sangat berisiko pada kerusakan lingkungan dan kerusakan alam. Bergantung pada hutan, maka cadangannya untuk produksi sudah tidak memungkinkan lagi. Tekanan internasional terhadap kebijakan jedah tebang makin kuat.

Pada sisi lain Riau senantiasa kebanjiran penduduk pendatang yang ingin mengadu nasib di daerah ini. Pertumbuhan penduduk Riau tahun 2008 sebesar 6,22 persen dan lebih separohnya disumbangkan oleh migrasi masuk. Namun demikian tingkat pengangguran terbuka masih mengalami penurunan. Tahun 2006 pengangguran terbuka sebesar 11,46 persen, tahun 2007 turun menjadi 10,39 persen dan tahun 2009 tinggal 9,35 persen.

Untuk mengurangi tingkat kesengsaraan rakyat Riau ada dua isu penting yang mesti dicermati, yakni menurunkan angka inflasi dan mengurangi tingkat pengangguran. Angka inflasi diturunkan melalui peningkatan produksi bahan pangan.



diaktifkan kembali secara intensif para penyuluh pertanian untuk mendorong masyarakat memproduksi bahan pangan pokok melalui lahan-lahan yang selama ini terabaikan akan menjadi solusi yang sangat efektif. Masyarakat dapat mengurangi konsumsi pangan dari luar daerah dengan memproduksi sendiri bahan-bahan tersebut, seperti beras, jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan. Program OPRM yang sedang digalakkan pemerintah Riau hendaknya diarahkan bagi kepentingan ini, jangan sekedar membuat proyek cetak sawah semata.

Perlu pula dilakukan pembenahan pada sektor industri kecil dan rumah tangga. Sektor industri yang berkenaan dengan industri konveksi untuk penyediaan baju seragam sekolah perlu didorong dengan pola bantuan modal dan standarisasi mutu yang kompetitif agar penyediaan kebutuhan baju sekolah pelajar di Riau dapat disuplai dari daerah sendiri. Pada awal tahun ajaran biasanya inflasi banyak didorong oleh komponen produk ini.

Menyangkut ketenagakerjaan perlu dilakukan profesionalisme dalam hal manajemen kependudukan. Termasuk dalam mendorong investasi yang padat karya harus lebih diarahkan untuk menampung penduduk tempatan. Jangan sampai masuknya modal ke Riau juga diiringi oleh masuknya penduduk baru yang besar dan bekerja disektor tersebut. Bila hal seperti itu terjadi maka upaya menurunkan angka pengangguran akan sulit dilakukan dan tingkat kesengsaraan rakyat tak akan pernah berkurang. Profesionalisme manajemen kependudukan bukan berarti menghalangi orang datang tetapi memastikan berapa, siapa dan untuk apa ia datang serta bagaimana memberikan pelayanan terhadap semua penduduk yang ada secara baik dan seadil-adilnya.***

EDYANUS HERMAN HALIM



4.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

KIAN LULUH LANTAK?

BERKAITAN dengan otonomi yang tercurah ke Riau sempena perubahan paradigma pemerintahan Indonesia telah dapat dinikmati dalam dua hal utama. *Pertama*, membesarnya anggaran yang didesentralisasi ke daerah dengan kewenangan menggunakannya yang cukup fleksibel. Dana-dana ini diperoleh sebahagian besar dari dana bagi hasil sumber daya alam. Daerah-daerah penghasil migas mendapat dana berlimpah yang dapat digunakan sesuai kehendak daerah.

Kedua, kewenangan pimpinan daerah mengatur dan menetapkan aparaturnya sehingga memungkinkan untuk membangun gerbong birokrasi yang dapat diarahkan bagi mencapai visi dan misi daerah. Bupati dan Gubernur dapat menunjuk orang yang dia kehendaki menjadi kepala dinas untuk menjalankan program guna merealisasikan janji-janji yang disampulkannya dalam proses pemilihan kepala daerah. Ketika ia memenangkan pilkada maka ada kesempatan untuk



mewujudkan impian dan harapan-harapan yang telah ditaburkannya pada masyarakat dengan tersedianya dana dan sumber daya manusia yang mampu ia kendalikan dan laksanakan.

Apa yang terbayang dari perspektif otonomi daerah ini adalah kesejahteraan rakyat yang meningkat dan perkembangan keskinambungan karena daerah memiliki kesempatan untuk menentukan sendiri proses dan capaian-capaian pembangunannya. Namun dibalik semua itu mengikut pula risiko-risiko yang tidak kecil. Bila daerah tak mampu mengelola pembangunan diwilayahnya maka bakal mencuat kedaerahan yang tak berdasar, raja-raja kecil yang sok berkuasa. Tergadainya sumberdaya alam dan luluh lantaknya tanah hidup rakyat akibat eksploitasi yang tak beraturan.

Dana yang semula sedianya harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kini tertabur sia-sia. Banyak kerja-kerja mubazir yang ditaja atas nama kepentingan rakyat. Berhala-berhala modern ditegakkan dan secara massif menenghisap uang rakyat. Hutan-hutan dikelupaskan untuk kepentingan pemburu rente. Jalan-jalan rusak dan terbengkalai. Manipulasi merebak dengan berbungkuskan pemberantasan kemiskinan. Riau menjadi contoh konkrit dari melencengnya mimpi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemimpin-pemimpinnya keranjingan berpesta pora dan berfoya-foya melancong keluar negeri.

Atas nama pembangunan kehidupan rakyat di hari esok digagas berbagai kegiatan yang sesungguhnya justru malah merezam dari depan anak cucu. Kita jadi sangat terperanjat ketika uang mencapai lima milyar yang dipakai bagi

EDYANUS HERMAN HALIM



pembangunan pabrik biodiesel malah menjadi penghasil "tuak" yang meluluh-lantakkan masa depan anak cucu. Uang rakyat terkuras hanya untuk merebakkan sumber maksiat. Atas nama kemaslahatan masa depan justru kita mejejalani anak cucu dengan racun-racun penghancur harapan dan kehidupan kelak.

Berdiri bulu roma ketika kita menengarai banyaknya dana yang harus dikorbankan untuk program berlabel OPRM. Program ini ditaja untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Sawah-sawah baru akan dicetak dan sawah-sawah lama akan dipulihkan semula. Riau yang selama ini menjadi pengimpor beras dan kebutuhan pokok lainnya melalui Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) akan disulap menjadi penghasil padi-padian dan jagung. Namun, mimpi ini memang benar-benar sebuah mimpi dan tak kunjung jadi kenyataan. Lahan-lahan OPRM justru tak berubah dari semak belukar. Jangankan menjadi penghasil beras, ilalang pun enggan menguak. Lahan masih semak dan hutan belantara. Dana pembangunan tentunya sudah banyak tercurah. Hasilnya kian jauh panggang dari api.

Pola-pola pembangunan yang mengedepankan kesediaan semata juga tampak dari pembangunan berbagai gedung pemerintah dan fasilitas lain di Riau. Terminal Agribisnis Dumai menjadi gedung bersarangnya kambing liar. Harapan menjadi pintu gerbang ekspor hanyalah pepesan kosong belaka. Bahkan pelabuhan Ro-Ro Dumai Malaka menjadi saksi baru betapa melencengnya pembangunan yang ditaja Riau dari kepentingan masa depan rakyat. Akhir-akhir ini Riau juga digerogeti oleh helat-helat besar yang tak



bertalian dengan kemaslahatan rakyat.

Nampanya para pemimpin di Riau ini telah terjebak dalam sindrom inkontinensi (*incontinence syndrome*) yang menunjukkan suatu gejala ketidakmampuan akal sehat seseorang mengontrol naluri dasar manusia yang cenderung mengumbar kenikmatan ragawi sehingga yang bersangkutan gagal mencapai nilai kehidupan yang lebih tinggi (J. Kristiadi, 2010). Sindrom ini mengakibatkan para pemimpin di negeri ini kedap terhadap suara dan jeritan hati rakyat. Bahkan mereka telah mati rasa. Empatinya sudah tumpul dan gemilang mewahana yang selama ini dinikmati semakin meningkatkan ketidakmampuan mereka mengontrol naluri keagamaan dan keangkaramurkaan.

Begini banyak dana yang harus dikorbankan Riau hanya untuk menyelenggarakan sebuah pesta olah raga berlabel PON. Pengalaman penyelenggaraan MTQ Nasional di Riau sebenarnya menjadi tempat berkaca. Bangunan-pangunan purna MTQ menjadi mubazir dan rakyat tak merasakan manfaat dari penyelenggaraan even-even tersebut. Hanya untuk menunjang proses penyelenggaraan PON Riau harus mengorbankan dana Rp 787 milyar. Ini jelas-jelas akan membuat semakin tak seimbangnya struktur APBD Riau. Keadaan ini dapat dibaca dari Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Riau Tahun Anggaran 2011 dimana banyak SKPD yang tak memiliki kegiatan berarti tetapi harus mengeluarkan biaya pegawai yang sangat besar.

Kesalahan lain dalam strategi pembangunan Riau sejak delapan tahun terakhir adalah pendekatannya yang sangat urban bias. Pertumbuhan kota meningkat sedangkan wilayah



pedesaan menjadi kian tertinggal. Industrialisasi terfokus di perkotaan sementara pembangunan pertanian di pedesaan terabaikan. Akibatnya urbanisasi meningkat dan persoalan-persoalan social semakin mengemuka dan bahkan kian sulit dikendalikan.

Problema perekonomian rakyat saat ini masih terbelenggu oleh kapasitas infrastruktur yang buruk, perlindungan social yang rendah, keberpihakan yang tidak memadai, kepastian usaha yang tidak jelas dan etika usaha yang memalukan. Oleh karena itu kualitas pertumbuhan ekonomi Riau tidak kian membaik. Sejak tahun 2006 pertumbuhannya pun makin melemah. Usaha-usaha rakyat seperti mengalami sindrom mayat berjalan (dead-man walking syndrome). Mereka terjebak pada kenangan masa lalu, tak jelas focus usaha dan pasar yang harus dilayani, proses bisnisnya kian usung dan strateginya tidak memiliki keterkaitan dengan birokrasi usahanya sehingga Nampak caku dan lamban merespon perkembangan eksternal.

Kedepan pemutarbalikan keadaan ini menjadi penting dan mendesak. Kesadaran akan habisnya sumberdaya yang tak terbarukan harus kian ditanamkan. Riau tak mungkin bertahan dengan program-program yang tak masuk akal dan masih sangat erat dengan kepentingan-kepentingan kolusi dan nepotisme. Cara-cara yang tak berdasarkan kajian yang memadai harus dikesampingkan. Riau harus mampu menaja karya-karya kreatif yang dekat dan erat dengan proses pemberdayaan rakyat. Tanpa itu Riau akan semakin luluh lantak dan terpinggirkan.

Menurut Maria Hartiningsih (2010) keberlangsungan



hidup dan kehidupan hanya bisa diciptakan dengan menjaga, melindungi, dan memelihara secara bersama-sama ruang-ruang hidup. Kesadaran akan pengelolaan bersama ruang hidup membuat keberadaban dan keadilan sebagai nilai-nilai yang menyatu dalam diri warga. Kalau demikian maka dalam proses pembangunan yang diselenggarakan di Riau hendaknya mengedepankan partisipasi dan kebersamaan. Menampung semangat dan keterlibatan rakyat menjadi hal yang bisa diawar-tawar dalam satu bingkai kebersamaan yang adil dan saling mnyejahterakan.***

Repository of Riau

<https://repository.unri.ac.id>



Hak cipta milik Universitas Riau

1. Harap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



5.

NAKED SHORT SELLING

NEGARA-negara di Eropa masih kelumpungan menghadapi guncangan perekonomian mereka. Sejak tahun 2008 perekonomian Eropa masih dihadapkan pada pergulatan mengatasi krisis keuangan dan perbankan yang berdampak pada kemerosotan perekonomian dan naiknya pengangguran. Ratusan milyar dollar AS sudah digelontorkan untuk menyelamatkan perekonomian. Tahun 2008 Inggris menyediakan dana talangan US\$ 656 milyar, Perancis US\$ 463 milyar, Jerman 664 milyar, Belanda US\$ 257 milyar, dan Yunani US\$ 36 milyar. Bahkan China harus menggelontorkan dana sebesar US\$ 586 milyar untuk menstimulus perekonomian mereka (Kompas, 13 November 2008). Bandingkan dengan Indonesia yang hanya mengeluarkan dana sebesar Rp 6,7 triliun untuk mem-bailout Bank Century. Sampai saat ini perekonomian Indonesia masih selamat walaupun dihadapkan pada tantangan yang kian berat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Yunani bahkan masih berkuat dengan utang negaranya yang kian membengkak mencapai 100 persen dari Produk Domestik Bruto-nya. Perdana Menteri Spanyol, Luis Rodriguez Zapatero, bahkan telah mengumumkan pemotongan gaji pegawai negeri Spanyol sebesar 5 persen. Zona euro sepakat membantu Yunani sebesar 110 milyar euro dan menyetujui paket US\$1 triliun untuk mengatasi krisis utang euro. Kurs dolar mengalami kemerosotan mencapai titik terendah selama bulan terakhir ke level 1,2486 dollar AS per satu euro (Kompas, 15 Mei 2010). Untuk mengantisipasi kian merosotnya nilai euro Uni Eropa sepakat mempersiapkan dana pertolongan sebesar 1 triliun euro. Diharapkan krisis utang tidak akan meluas dan kurs euro tidak kian terguncang sehingga pemulihan perekonomian global dapat dipertahankan pada track yang membaik.

Kebijakan yang lebih dramatis dilakukan Jerman untuk mempertahankan perekonomian mereka. Meskipun mendapat tanggapan yang beragam, baik dari kalangan pengusaha, perbankan dan pemerintah di belahan dunia, pemerintah Jerman berketetapan untuk melarang praktek *naked short selling* obligasi. Kebijakan ini jelas akan mengendorkan gairah investor di bursa saham dan membuat orang akan beralih pada media investasi yang lain. Namun, dengan mengekang perdagangan spekulatif kemerosotan indeks dapat dihambat. Bagaimana pun kebijakan mendadak yang dilansir Kanselir Angela Merkel telah memberikan kejutan di pasar saham Eropa. Indeks saham di bursa London turun 2,3 persen dan Paris anjlok sebesar 2,84 persen. Bahkan di Jerman sendiri indeks Frankfurt terjunjal mencapai 2,59 persen. Pelaku pasar uang juga bereaksi negative sehingga

EDYANUS HERMAN HALIM



kurs euro terhadap dollar Amerika mencapai titik terendah sejak April 2010 yakni 1,2144 dollar AS per satu euro.

Bagaimana pun pahitnya kebijakan pelarangan *short selling* ini perlu diambil guna mengantisipasi berlanjutnya keterpurukan harga-harga saham. Walaupun negara-negara Eropa lainnya tidak mengikuti, tetapi bagi Jerman ini menjadi terapi bagi menghambat para spekulan memainkan triknya untuk mendapatkan keuntungan di tengah kemerosotan ekonomi. Kejatuhan harga saham akan kian parah bila *short selling* tidak dilarang. Walaupun akan membuat para pelaku pasar modal terhambat kiprahnya, namun perlu adanya aturan keras dalam membatasi merebaknya upaya menangguk air keruh.

Di Amerika Serikat, *short selling* diatur sedemikian rupa. *The Security and Exchange Commission* tidak membolehkan dilakukannya *short selling* saat harga pasar sekuritas sedang mengalami kemerosotan. Ini dilakukan agar tidak memperburuk situasi dan para spekulan tidak mengambil keuntungan pada situasi pasar dalam keadaan panik. *Short selling* didasarkan pada *uptick* (harga yang lebih tinggi dari sebelumnya) atau *zero-plus tick* (harga yang sama dengan sebelumnya, namun lebih tinggi dari dari transaksi terakhir dengan harga yang berbeda).

Short selling menurut William F. Sharpe (1995) merupakan penjualan surat berharga (saham atau obligasi) dengan jalan meminjam sertifikat surat berharga tersebut untuk digunakan sebagai permulaan perdagangan lalu membayar hutang dengan sertifikat yang diperoleh kemudian. Misalkan Tuan Ali menghubungi pialangnya, katakanlah PT.



Bogor untuk meminjam saham yang ada ditangan pialang tersebut, misalnya saham PT. Manis. Oleh Tuan Ali saham tersebut dijual pada harga Rp 1.500 per lembar dan berharap harga saham tersebut akan turun harganya. Ketika harga saham PT. Manis ternyata memang merosot harganya, Tunggaplah menjadi Rp 1.250,- Tuan Ali akan membeli saham perusahaan tersebut dan mengembalikannya pada perusahaan pialangnya PT.Bogar. Dari cara transaksi seperti Tuan Ali sebagai spekulan yang bermain di bursa akan mendapat keuntungan Rp 250,- per lembar sahamnya.

Walaupun kondisi bursa mengalami penurunan harga, tidak tertutup kemungkinan bagi pialang untuk mendapat keuntungan. Di bursa saham *Wall Street* pepatah lama yang berbunyi; 'jeli murah dan jual mahal' menjadi basi dengan adanya transaksi *naked short selling*. Istilahnya berubah menjadi "jual mahal dan beli murah. Pada prinsipnya sama namun investor yang waspada dan jeli bermain di bursa akan mampu mengambil keuntungan dalam kondisi bursa sedang naik (*bullish*) maupun dalam keadaan bursa sedang melorot (*bearish*). Jika pemerintah tidak mewaspadai *short selling* ini maka akan terjadi kemerosotan bursa yang kian parah. Emiten atau perusahaan yang listing di bursa akan terperosok pada penurunan nilai kekayaan pemegang saham yang akut dan menunggu bangkrut sementara para spekulan menanggung keuntungan. Bayangkan jika perusahaan tersebut adalah sebuah bank maka pemerintah akan sangat dirugikan karena akan ada upaya *bailout* untuk menyelamatkan gun-cangan dalam industri moneter.

Lantas, bagaimana kaitannya dengan Indonesia,

EDYANUS HERMAN HALIM



khususnya Riau. Dampaknya mulai terasa pada harga komoditas utama ekspor Riau. Walaupun baru mengalami penurunan tipis harga sawit dihadapkan pada ketidakpastian permintaan pasar. Para investor dunia, khususnya Eropa mengalihkan investasinya ke dollar Amerika yang menguat sejalan dengan mengikisnya kepercayaan terhadap perekonomian Eropa yang berdampak pada melemahnya euro. Pasar modal Indonesia juga melemah karena gerakan beli dollar yang meningkat. Investor asing yang selama ini bermain di Bursa Efek Indonesia mulai mengalihkan kepemilikan sahamnya ke dollar AS. Aksi jual saham meningkat harga tertekan. Di Riau saat ini investasi pada saham melambat dengan nilai transaksi sekitar Rp 4 triliun dan melibatkan tidak kurang dari 1.631 investor. Kekayaan mereka dapat teruras jika kepiawaian mereka bermain tidak memadai sejalan dengan melemahnya harga-harga saham di Bursa Efek Indonesia. Dampak lain yang dari gonjang ganjing perekonomian dunia, khususnya Eropa adalah melemahnya nilai tukar rupiah. Meskipun harga komoditas pertanian dan sumber bahan baku lainnya dapat terangkat namun akibat permintaan yang melemah harga justru mengalami penurunan.

Menghadapi ancaman krisis Eropa ini haruslah disikapi dengan kebijakan ekonomi yang terukur. Indonesia menunggu tangan dingin menteri keuangan yang baru dan gebrakannya meningkatkan kepastian berusaha di masyarakat. Selain itu, *hot money* yang sebelum ini masuk di Bursa Efek Indonesia harus dipegang agar tidak keluar secepat masuknya dana tersebut. Bila terjadi *outflow* dollar yang tinggi, maka rupiah akan kian tertekan. Harus ada keberanian untuk mengambil kebijakan agar dana-dana jangka pendek dapat mengalir



kepada investasi jangka panjang. Untuk itu disamping kepastian usaha, ketersediaan infrastruktur, dan faktor keamanan menjadi kunci penting. Termasuk menghindari kehancuran kinerja ekonomi yang sebelum ini sudah cukup baik dari manuver-manuver politik yang tak berpijak pada kepentingan bangsa. Kompromi-kompromi politik jangan sampai menimbulkan hilangnya kepercayaan pelaku usaha terhadap dinamika ekonomi di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas ekonomi nasional yang mulai tumbuh dan mengikis sedikit demi sedikit distorsi ekonomi kartel-koncoan haruslah ditindaklanjuti dan dipertajam substansi dan sasarannya.

Khusus untuk Riau, upaya-upaya menumbuhkan industri hulu yang terdiversifikasi dengan baik dari aspek pasar dan komoditas menjadi tantangan yang tak terelakkan. Koordinasi pembangunan antar wilayah mutlak dilakukan untuk menghindari penggunaan anggaran pembangunan yang lemah sinergi dan boros. Utilitas setiap dana pembangunan harus kian dikedepankan sehingga azas manfaat sebelum ini cenderung diabaikan dapat ditimbulkan kembali. Proyek-proyek pembangunan yang tak bersentuhan dengan peningkatan kapabilitas dan kinerja rakyat harus diusaikan. Apalagi sekedar berwacana dengan biaya yang besar tapi hasilnya tak dirasakan sama sekali.***



6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak menginkan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

ARGUMENTUM AD VERECUMDIAM

STUDI banding anggota DPRD Riau ke berbagai negara di Eropa memberikan kesan yang sangat memprihatinkan rakyat. Secara procedural kunjungan tersebut mungkin tidak melanggar berbagai ketentuan yang ada. Siapa yang akan disalahkan bila dikaitkan dengan legitimasi anggaran sulit dicari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibuat oleh pemerintah dan dibahas untuk disetujui oleh DPRD. Setelah itu diverifikasi oleh Menteri Dalam Negeri dan bila tidak ada yang perlu diperbaiki rencana anggaran tersebut dapat dilaksanakan. Bila didalamnya ada anggaran untuk studi banding maka sah lah acara plesiran tersebut ditaja. Bahkan bila tak dilaksanakan akan menjadi sisa anggaran yang menimbulkan penilaian buruk bagi kinerja anggaran.

Persoalan muncul ketika rakyat merasa kegiatan tersebut kurang bersentuhan dengan upaya pemberdayaan dan



meningkatkan kesejahteraan mereka. Studi banding dinilai hanya berguna bagi kepentingan anggota DPRD itu sendiri.

Diluar memenuhi kebutuhan berwisata dan menghabiskan anggaran studi banding nampaknya juga telah memperangkap anggota DPRD Riau dalam suatu sindrom yang disebut J. Kristiadi (2010) sebagai *Argumentum ad Verecundiam*. Sindrom merupakan logika sesat yang muncul akibat kesimpulan berdasarkan pada kekaguman atau keterpukauan terhadap suatu yang dikagumi banyak orang. Pemahaman terhadap yang diamati tidak berdasarkan analisa yang memadai didukung oleh landasan keilmuan yang memadai.

Perangkap sindrom *Argumentum ad Verecundiam* yang menjerat anggota DPRD Riau nampak ketika mereka berujung ke Swiss dan menyaksikan objek wisata jembatanantung. Dari wawancara yang dilakukan media massa mereka mengungkapkan betapa terkagum-kagum akan hal tersebut dan langsung berfikir akan lebih baik bila objek wisata Danau Toba di Pekanbaru juga dibangun hal yang sama. Logika seperti inilah yang bisa dianggap logika sesat bila kesimpulan yang diambil tersebut hanya didasarkan pada keterpukauan mereka menikmati suasana pelancongan di Swiss.

Logika itu baru akan berarti bila mereka mendasarinya dengan fakta-fakta otentik tentang kunjungan wisata di Swiss (baik lokal maupun manca negara), investasi yang ditanamkan untuk menggarap objek wisata tersebut, tingkat pengembalian investasinya dan manajemen pengelolaannya. Termasuk pandangan-pandangan masyarakat di sana tentang pariwisata dan perilaku-perilaku mereka dalam mengembangkan industri pariwisata dan wisatawan itu sendiri. Setelah data tersebut



terkumpul dilakukan verifikasi dengan kondisi di Danau Buatan khususnya dan Pekanbaru sendiri sebagai kota yang akan dijadikan tujuan wisata. Kesimpulan baru boleh dinyatakan bahwa apa yang dilihat dan dinikmati di Swiss adalah cocok diterapkan di Pekanbaru atau Riau bila semua variable-variabel tersebut memiliki kesamaan atau setidaknya kemiripan yang searah. Bila tidak, maka Riau akan makin tersandung dalam pikiran yang sesat oleh keterpukauan. Bukan berdasarkan studi yang valid, komprehensif dan secara metodologi teruji kebenarannya.

Plesiran anggota DPRD dengan demikian memiliki risiko yang sangat besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Riau. Bisa terjadi, visi besar yang digagas selama ini untuk dicapai, akan semakin mengawang-awang karena upaya-upaya untuk mencapainya tidak digagas dengan benar dan akurat. DPRD memiliki fungsi budgeter yang cukup kuat. Program dan kegiatan pembangunan hanya disusun berdasarkan logika sesat dari sebuah keterpukauan muaranya adalah semakin menggeliatnya ego individual dan kelompok dalam menyusun program pembangunan dan anggaran. Ancangan kegiatan menjadi tidak focus dan satu sama lain tidak memiliki keterkaitan strategis. Sulit diperoleh anggaran yang sinergis dengan pola-pola penganggaran seperti itu. Risikonya dalam jangka panjang sangat fatal dimana sumberdaya pembangunan akan terkuras tanpa menghasilkan kinerja yang memadai. Bila sumberdaya pembangunan lebih banyak diperoleh dari mengeksploitasi sumber-sumber alam yang *unrenewable* (tak terbaharukan), maka pada tahap munculnya kelangkaan sumber-sumber tersebut sumber penganggutnya terlambat dibenahi.



Logika sesat akan semakin menggelantung dalam diri anggota DPRD Riau yang studi banding ke luar negeri bila mereka tidak memiliki cukup pengetahuan untuk menyerap dan menapis infiltrasi budaya asing dalam pikiran mereka. Hal ini baik karena kelemahan menguasai bahasa asing maupun sikap-sikap “budik” yang masih belum bisa mereka campakkan dalam tatanan kehidupan kesehariannya. Kondisi ini juga dapat menimbulkan sindrom baru yang menurut J. Kristiadi (2010) disebut sebagai *incontinence syndrome*. Ini merupakan suatu gejala ketidakmampuan akal sehat seseorang mengontrol naluri dasar manusianya yang cenderung mengumbar hawa nafsu dan kenikmatan ragawi sehingga yang bersangkutan gagal mencapai nilai-nilai kehidupan yang lebih tinggi.

Sindrom ini dapat menempatkan anggota DPRD Riau semakin tidak kedap terhadap suara dan jeritan rakyat. Mereka semakin “lali” atau bahkan mungkin mati rasa terhadap sentuhan-sentuhan orang-orang yang diwakilinya. Daya empatinya menumpul dan makin terbuai oleh gelimang kemewahan berbagai fasilitas yang dinikamatinya. Mulai dari gaji yang besar, tunjangan yang tinggi, fasilitas kendaraan, fasilitas kantor, rapat-rapat diberbagai hotel, samapi-sampai setiap ada Pansus yang dibentuk setiap itu pula ada studi bandingnya. Pada akhirnya dikhawatirkan justru bergelimang kemewahan ini akan semakin mendidik mereka pada ketidakmampuan mereka mengontrol naluri ketamakan dan keserakahan. Maka akhirnya bagi Riau adalah inefisiensi dalam proses pembangunan dan kecemburuan sosial masyarakat.

Riau sebenarnya tidak membutuhkan banyak pemikiran apalagi studi banding untuk mengimplementasikan proses

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



pembangunan yang berbasis kesejahteraan rakyat. Cakupan air bersih di Riau, khususnya di perkotaan masih sangat minim.

Untuk itu, pelayanan publik dalam masalah ini tinggal dikerjakan. Sebagian besar rakyat bekerja di sektor pertanian dengan kemampuan bertani yang kurang memadai, maka tak perlu studi banding untuk memberdayakan petani. Melakukan kunjungan ke petani, lalu serap keinginan dan kebutuhan mereka. Pilah semua itu menjadi kristalisasi program sehingga kegiatan pembangunan memang dapat menyentuh penyelesaian akar persoalan rakyat.

Investasi yang beragam dan menjadi penopang perekonomian rakyat tak mungkin masuk ke Riau bila aspek infrastruktur tidak dibenahi dengan baik. Jalan-jalan pedesaan dan lingkungan masyarakat masih sempit, berlubang dan tak mampu menahan beban kendaraan. Listrik ke berbagai pelosok tak tersambung dan manajemen kelembagaan masyarakat masih sangat kurang memadai untuk mereka mampu mengelola sumberdaya alam yang dimiliki. Inilah yang menjadi kunci ketertinggalannya dan upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui program pembangunan. Keberpihakan yang memadailah yang sangat diperlukan rakyat agar mereka terlepas dari cengkaman kapitalisme ekonomi yang merejam kehidupannya.

Riau memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan selalu berada di atas rerata nasional. Namun, kue ekonomi yang besar tersebut hanyalah milik segelintir orang. Ketimpangan ekonomi masih sangat tinggi dan hegemoni ekonomi menggurita disetiap pelosok negeri dalam tampilan yang beragam. Perusahaan-perusahaan besar mencaplok



han-lahan sekehendak hati karena mereka bisa “memerdayai” kekuasaan negara. Kesenjangan ekonomi kian parah karena keberpihakan pemerintah memang tidak memadai dan wakil-wakil rakyat justru kian terkesima oleh berbagai fasilitas yang mereka peroleh dengan mewakili penderitaan rakyat tersebut. Penyelesaian ketimpangan ini mungkin lahir dari hasil studi banding anggota DPRD Riau. Salah satunya upaya yang dapat ditempuh adalah distribusi aset ekonomi. Bila tidak dimulai secara terencana dan baik maka bibit konflik ekonomi akan mendewasa menjadi kerusakan-kerusakan social yang memilukan.

Niccolo Machiavelli dalam F. Budi Hardiman (2010) mengingatkan bahwa seorang pemimpin tak boleh mencuri harta rakyatnya karena manusia lebih mudah melupakan kematian daripada kehilangan bagian warisannya. Ini memberi pelajaran bahwa ingatan manusia akan harta benda jauh lebih kental ketimbang terhadap masalah-masalah sepekaannya terhadap nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Anggota DPRD Riau yang berstudi banding dalam konteks ini bisa terpacu berposisi sebagai pemimpin dan dapat pula berposisi sebagai rakyat yang tak mau kehilangan kerakusannya terhadap harta benda.

Padahal menurut Aristoteles politik yang bermartabat itu adalah politik yang mengubah rakyat dari sekedar hidup belaka (*bare life*) menjadi hidup yang baik (*good life*). Oleh karenanya hendaklah kita kian menyadari bahwa yang perlu dibangun itu bukanlah gedung-gedung, jalan-jalan dan jembatan-jembatan semata. Paling penting dari semua itu adalah membangun para penghuni gedung dan para pejalan



sehingga mereka memiliki mental yang baik, sensitivitas, empati, komitmen dan integritas sehingga mereka pantas menyanjung kehormatan masyarakat Melayu yang madani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



ANTARA XINJIANG AN BANGUN PURBA

ERISTIA kerusuhan antar etnis di Xinjiang China memberikan pelajaran yang berharga bagi pengelolaan investasi dan kependudukan. Meskipun berawal dari sejarah panjang kepentingan politik pemerintah China terhadap wilayah Xinjiang tetapi bila pengelolaan kependudukan dan ekonomi wilayah itu lebih baik, benih-benih permusuhan etnis akan dapat dikurangi secara bertahap.

Jumlah korban tewas dalam kerusuhan di Xinjiang mencapai 156 orang dan sejumlah besar lainnya luka-luka. Sebanyak 5000 orang turun ke jalan melakukan protes atas buruknya perilaku pemerintah menangani bentrok antar etnis yang terjadi pada bulan Juni lalu. Sementara bentrok antar etnis itu sendiri dipicu oleh adanya perkelahian yang terjadi antara etnis Uighur sebagai penduduk asli wilayah Xinjiang dengan etnis Han yang merupakan penduduk pendatang.

EDYANUS HERMAN HALIM



Warga Uighur yang mayoritas muslim menentang proses pertumbuhan ekonomi yang dititikberatkan pada investasi dengan memberi kemudahan bagi etnis Han untuk menguasai aset-aset ekonomi produktif di Xinjiang. Dalam kaca mata etnis Uighur keberpihakan pemerintah dalam investasi dan subsidi pemerintah pusat lebih banyak menguntungkan etnis Han yang justru merupakan penduduk pendatang di wilayah Xinjiang. Kebijakan pemerintah seperti ini telah menyebabkan tersisihnya kesempatan etnis Uighur untuk memperoleh kue ekonomi secara adil dan menyebabkan pemiskinan dalam kehidupan mereka. Kesengsaraan ekonomi yang terjadi dan perlakuan pemerintah yang kurang proporsional makin menyuburkan benih-benih permusuhan yang justru kian menyulitkan perbaikan perekonomian masyarakat secara umum.

Menyimak kasus yang terjadi di Xinjiang terbayang pula berbagai peristiwa bentrokan antar masyarakat dan pemilik modal yang kian marak di Riau. Meskipun masih bersifat parsial, peristiwa bentrokan antara masyarakat dan pemilik modal di Riau dapat menggejala pada kerusakan-kerusakan yang meluas. Kasus yang sama mungkin dapat dipelajari di Indonesia dengan adanya peristiwa Sampit di Kalimantan. Berbagai bentrokan dalam memperebutkan lahan antara penduduk tempatan dengan pemilik modal yang berinvestasi di wilayah itu yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang kurang proporsional menyebabkan benih-benih kerusakan yang lebih luas belum dapat ditebas. Bila benih-benih tersebut kian tumbuh subur maka proses penyelesaiannya akan kian sulit dan kerugian yang bakal ditimbulkan tidak akan sedikit jumlahnya.



Kasus bentrokan yang terjadi di Desa Tangun, Kecamatan Tangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu misalnya adalah karena berlarut-larutnya proses penyelesaian yang dilakukan pemerintah. Termasuk respon yang sangat lambat yang dilakukan aparat keamanan. Kondisi ini memungkinkan benih-benih perseteruan antara perusahaan dan masyarakat kian tumbuh menjadi pemicu konflik dan kerusuhan. Akibatnya masyarakat menjadi korban dengan cara yang sangat mengenaskan.

Menurut catatan Tim Pencari Fakta dari Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) pertentangan masyarakat dengan PT. Sumatra Sylva Lestari (SSL) telah menyebabkan 3 warga meninggal dan mencederai setidaknya 10 orang akibat lemparan batu dan umpulan benda keras dari security dan karyawan perusahaan. Persengketaan perusahaan pemodal dengan masyarakat tempatan di wilayah ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sekitar tahun 1995. Sampai sekarang tidak ada jalan keluar yang mampu dicetuskan, baik oleh pemerintah kabupaten maupun level pemerintahan yang lebih tinggi. Bahkan perseteruan memperebutkan lahan seluas 1000 Ha ditetapkan sebagai *status quo* tanpa ada penyelesaian yang memadai dan mampu menempatkan masyarakat pada posisi yang baik. Dalam kasus ini dan kasus-asus lainnya masyarakat selalu ditempatkan oleh penguasa pada posisi yang tidak menguntungkan walaupun mereka telah dicurangi oleh aturan pemanfaatan lahan yang ditetapkan pemerintah itu sendiri atau bahkan oleh perilaku pemilik modal yang berbuat diluar perundang-undangan, seperti membuka lahan lebih luas dari ketentuan atau tidak memperhatikan penduduk tempatan sebagai komunitas yang semestinya diberdayakan.

EDYANUS HERMAN HALIM



Kasus-kasus bentrok antara investor yang pada umumnya mendapat *backup* dari pemerintah sejak lama sudah mengemuka di Riau. Pada dasarnya dipicu oleh persoalan lahan usaha yang tidak jelas batas dan proses pengambilalihannya. Dalam proses ini, masyarakat tempatan banyak dirugikan dan pengusaha biasanya berlindung pada keputusan pemerintah yang mereka dapatkan. Keputusan-keputusan kepemilikan lahan yang dilakukan pemerintah selama ini ternyata hanya berpedoman pada kekuasaan perundang-undangan yang berlaku. Sayangnya perundang-undangan tersebut tidak dibentuk dan dilahirkan atas dasar kepentingan rakyat. Banyak aturan main pemerintah yang dibuat justru merupakan hasil pesanan dari para pengusaha itu sendiri sehingga ketika diterapkan sangat tidak memihak kepada rakyat.

Persoalan kepemilikan lahan di Riau kian lama tidak akan mengerucut. Riau menjadi tumpukan gula bagi semut-semut pendatang. Apakah untuk *melabur* (berinvestasi) maupun mencari peruntungan hidup. Semua membutuhkan tanah. Bisnis perkebunan yang begitu marak membuat persoalan tanah menjadi sumber konflik yang bekepanjangan. Termasuk pula usaha-usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) yang merambah ke segenap pelosok kehidupan rayat dan menghisap kesempatan masyarakat mengelola ebutuhan hidup dan masa depannya. Pertumbuhan penduduk Riau saat ini mencapai 6,25 persen dan sebahagian besar disumbangkan oleh penduduk migran masuk yang sangat tinggi. Penduduk migran masuk pada umumnya melalui perusahaan-perusahaan perkebunan dan perikanan serta investor lain yang mendatangkan tenaga kerja untuk berusaha di Riau.



mulai dari perkotaan sampai ke pedesaan.

Agar tidak menjadi “gelembung balon” yang setiap saat bisa meledakkan kerusuhan yang lebih parah, maka pemerintah, mulai dari level paling bawah sampai ke pusat, harus melakukan reformasi menyeluruh dalam manajemen kepemilikan dan penguasaan tanah dan lahan. Manajemen pendudukan difokuskan keakuratan pendataan dan keabsahannya identitas masyarakat. Termasuk sistem informasinya sehingga tidak ada penduduk ber KTP ganda atau penduduk ganda beridentitas satu.

Menyangkut pertanahan, penataan ulang kepemilikan tanah menjadi sangat penting. Pedomannya tidak hanya dari aspek kaidah-undang pertanahan negara belaka tetapi juga nilai-nilai lokal dan kepentingan-kepentingan masyarakat di masa yang akan datang. Banyak lahan-lahan yang ditelantarkan tetapi karena kepemilikannya masih dalam koridor perundangan-undangan pihak lain tidak bisa memanfaatkan. Pembatasan luasan kepemilikan lahan secara proporsional, khususnya untuk lahan usaha perlu diformulasikan kaidah-kaidahnya sehingga hegemoni lahan tidak terjadi.

Penataan tanah atau lahan juga menyangkut aspek fungsi bagi manusia. Jika suatu wilayah tidak memperhatikan dan mengelola dengan baik tanah atau lahan maka berbagai persoalan sosial akan muncul. Mulai dari sengketa perbatasan administrasi pemerintahan sampai pada tumbuhnya rumah-rumah dan usaha-usaha liar serta perseteruan-perseteruan memperolehan lahan. Usaha-usaha ekonomi masyarakat tidak akan terdistribusi dengan baik sehingga upaya mendorong keadilan ekonomi akan terkendala. Berapa

EDYANUS HERMAN HALIM



banyak luasan pemukiman, pertanian dan peruntukan lainnya hendaknya tergambar dari Rencana Umum Tata Ruang yang valid dan akurat. Kepatuhan terhadap RUTR sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesalahan dalam mengelola lahan. Sayangnya di Riau penyusunan RUTR menjadi sangat berlarut-larut dan outputnya nanti juga sangat disangsikan kesahihannya.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah penguatan kelembagaan pemerintahan pada level bawah (desa, RW dan RT) dalam aspek pendataan dan pengelolaan informasi. Penguatan institusi yang terdekat pada komunitas atau masyarakat dengan sistem kontrol yang baik dapat membawa pada kemudahan pengambilan kebijakan dan kelancaran proses pembangunan. Demikian pula untuk penataan lahan dan pola kesesuaiannya satu sama lain. Bila manajemen kependudukan dan tanah atau lahan tidak kunjung direformasi dengan kesadaran yang hakiki, maka selama itu pula proses pembangunan akan selalu tidak tepat sasaran dan konflik-konflik kian menjamur. Penyelesaiannya akan selalu dilakukan dengan pendekatan “tambal sulam” tanpa ada penanganan yang holistik dan strategis. Sudah saatnya kita berhenti “beternak” masalah. ***



KEKERIBUAN PENGANGGUR

ADAN Pusat Statistik Riau merilis data pengangguran di Riau untuk Agustus 2010. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 72 persen. Keadaan ini lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2009 yang hanya sebesar 8,56 persen. Naiknya angka pengangguran didorong oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang mencapai 5,16 persen. Sampai Agustus 2010 angkatan kerja bertambah 116.632 jiwa dimana pada Agustus 2009 baru sebanyak 2.260.862 jiwa maka pada Agustus 2010 naik menjadi 2.377.494 jiwa.

Pesatnya kenaikan angkatan kerja ternyata tidak sebanding dengan naiknya kesempatan kerja nyata atau jumlah orang yang bekerja. Pada Agustus 2009 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2.067.357 jiwa sedangkan tahun 2010 naik menjadi 2.170.247 jiwa atau meningkatnya hanya 4,98 persen. Tidak seimbangna kenaikan angkatan kerja dengan kesempatan kerja inilah yang menyebabkan

EDYANUS HERMAN HALIM



Riau menjadi negeri yang dipenuhi ribuan penganggur. Jumlahnya pada tahun 2010 mencapai 207.247 jiwa dengan peningkatan mencapai 7,1 persen jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2009.

Persoalan pengangguran di Riau tidak sebatas pengangguran terbuka semata. Masyarakat yang setengah penganggur juga tidak sedikit jumlahnya. Mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau pengangguran setengah kentara pada Agustus 2010 mencapai 821.918 jiwa atau 77,87 persen dari seluruh jumlah penduduk yang bekerja. Ini berarti penduduk yang benar-benar bekerja hanya 62,13 persen. Sisanya akan menjadi beban bagi penduduk yang bekerja dan memerlukan perhatian tertentu dari pemerintah agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan social tertentu dalam dinamika dan kehidupan masyarakat.

Selain aspek pengangguran terbuka dan pengangguran tak kentara, Riau juga dihadapkan persoalan banyaknya masyarakat yang bekerja di setor pertanian. Walau porsinya sedikit menyusut namun pada Agustus 2010 masih terdapat 44,6 persen penduduk yang bekerja di sector pertanian. Pada satu sisi merekalah yang sebenarnya menjadi penganggur tak kentara namun pada posisi lain dapat menjadi potensi yang sangat bermanfaat untuk menumbuhkan sector-sektor lain. Mereka yang bekerja disektor pertanian cenderung menggunakan sedikit waktu dan masih tersisa banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal lain. Industri rumah tangga dapat didorong produktivitasnya dengan menggunakan tenaga kerja pertanian diberbagai pedesaan. Apalagi sebagian besar masyarakat petani adalah mereka yang bekerja disub-sektor perkebunan.



Diamati dari status pekerjaan maka sebahagian besar penduduk bekerja sebagai buruh di sector pertanian ini. Mereka menjadi tenaga-tenaga perkebunan dan biasanya bukan berasal dari penduduk tempatan. Walaupun sector perdagangan dan jasa masih merupakan sector yang banyak menampung tenaga kerja diluar sector pertanian namun bila dilihat dari aspek status pekerjaan hanya 2,3 persen dari mereka yang bekerja berstatus sebagai pekerja bebas di luar pertanian.

Hanya terdapat 42,8 persen penduduk yang bekerja di sektor formal yang terdiri dari mereka-mereka yang berusaha dibantu oleh buruh tetap sebanyak 4,8 persen dan mereka yang berstatus sebagai buruh atau karyawan sebanyak 38 persen. Keadaan ini juga bakal menyulitkan daerah dari aspek pemataan ruang dan keindahan tata kelola spasial, khususnya untuk wilayah perkotaan. Banyak pekerja disektor non-formal menimbulkan masalah-masalah kesemrawutan diberbagai pojok kota. Baik karena terganggunya jalan dan kelancaran arus transportasi maupun masalah-masalah pendahannya kebersihan yang akan berkorelasi dengan menurunnya sanitasi dan kesehatan. Persoalan pemberdayaan juga menjadi rumit karena usaha-usaha non-formal sulit diberdayakan dan diberi dukungan permodalan melalui kredit dari institusi-institusi keuangan formal.

Problema tenaga ketenagakerjaan di Riau tidak sejalan dengan perkembangan perekonomian yang saat ini terjadi. Bila pengangguran di Riau semakin besar justru pertumbuhan ekonomi semakin membaik dan berada pada level yang tinggi. Pada triwulan ketiga 2010 pertumbuhan ekonomi Riau

EDYANUS HERMAN HALIM



mencapai 7,88 persen. Sedangkan selama periode Januari sampai dengan September 2010 mampu tumbuh sebesar 6,85 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sector pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 11,22 persen, namun sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,89 persen. Dari aspek penggunaan sumber pertumbuhan banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 3,32 persen. Proporsinya dalam struktur perekonomian Riau mencapai 53,07 persen.

Ironisnya perekonomian Riau dikaitkan dari aspek tenaga kerja menunjukkan gejala ketimpangan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ternyata banyak didorong oleh konsumsi masyarakat sementara pada sisi lain kue ekonomi masih banyak terpusat pada para konglomerat yang berkolaborasi dengan aparaturnya yang kurang memadai dari aspek kinerja dan moralitas kenegarawanannya. Kedepan kualitas perekonomian Riau hendaknya diperbaiki melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih memihak. *Pertama*, upaya-upaya redistribusi asset ekonomi harus semakin diprogramkan secara jelas dan terukur. Pemusatan sumber-sumber ekonomi pada para pengusaha besar harus kian dialihkan dan likuiditas ekonomi harus dialirkan keberbagai sector dan usaha ekonomi rakyat.

Kedua, mendorong terciptanya usaha-usaha formal dengan pemberdayaan dan pendataan yang valid dan program-program yang memihak mereka. Usaha-usaha masyarakat yang produktif didorong untuk makin mampu masuk ke sector formal agar semakin dapat diandalkan untuk membuka peluang kerja. Disamping itu menformalkan



usaha-usaha masyarakat akan kian memudahkan pihak perbankan memberikan dukungan permodalan. Dari aspek social kemasyarakatan upaya ini dapat mendukung terciptanya proses berusaha yang transparan, bertanggung jawab dan berkesinambungan.

Ketiga, melakukan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pekerja disektor pertanian. Pelatihan-pelatihan yang mampu menciptakan tenaga trampil akan mendorong mereka untuk memanfaatkan waktu kerja yang tersisa setelah bekerja sebagai petani. Kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan petani yang arahnya pada peningkatan konsumsi dan perbaikan kualitas hidup mereka. Produktivitas daerah akan semakin tinggi dan industry dapat kian bergerak pada menciptakan produk-produk substitusi import maupun produk-produk unggulan ekspor. Riau yang strategis dalam aspek letak geografis harus mampu menangkap terbukanya peluang pasar internasional.

Keempat, perbaikan infrastruktur pendukung, seperti jalan, pembatan dan air bersih. Dukungan aliran listrik bagi masyarakat pedesaan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan tenaga kerja tidak lari ke perkotaan. Beriringan dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan ketersediaan listrik desa akan mendorong pembukaan usaha-usaha produktif masyarakat. Ini berarti akan membuka peluang kerja pedesaan tanpa meninggalkan basis ekonomi pertanian yang selama ini digelutinya. Dukungan transportasi akan semakin menghubungkan mereka dengan sentra-sentra pasar dan sumber-sumber pembiayaan. Kebijakan ini akan bersinergi dengan upaya-upaya pemeratakan penguasaan sumber-sumber ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

EDYANUS HERMAN HALIM



Kelima, meningkatkan profesionalisme pemerintah mulai dari level bawah sampai ke level pengambil kebijakan sehingga tercipta suasana pelayanan masyarakat yang prima.

Upaya ini juga ditujukan untuk mengurangi biaya tinggi dan semakin menciptakan kepastian usaha ditengah-tengah masyarakat. Pola-pola birokrasi yang menghambat investasi dan menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat harus dikikis habis agar likuiditas perekonomian semakin mengalir pada setiap sisi kehidupan masyarakat.

Kenam, perbaikan berbagai aturan perundang-undangan yang selama ini kurang memihak rakyat. Banyak aturan pemerintah yang tidak kondusif bagi terselenggaranya perekonomian masyarakat. Untuk itu, upaya reformasi dan restrukturisasi berbagai kebijakan pemerintah harus kian diarahkan bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Termasuk berbagai kebijakan pendanaan APBD yang selama ini cenderung pro-aparat harus diubah menjadi pro-rakyat dan pro-poor.

Terakhir, menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berusaha. Premanisme yang marak dimana-mana harus diberangus agar rakyat dapat berusaha dengan tenang. Berbagai pungutan yang tidak jelas peruntukannya dan status pemungutnya harus dihentikan. Pemerintah harus senantiasa mengembangkan suasana bisnis yang etis dan bermutu sehingga kemampuan rakyat menghadapi persaingan global makin memadai. Tanpa semua itu, maka Riau dan masyarakatnya hanyalah menunggu waktu untuk tergilas oleh lajunya percaturan persaingan global.***



DA APA DI INHIL?

EMPENA memperingati hari jadi Provinsi Riau ke 52 kiranya perlu, tidak saja menyukuri, tetapi juga merenungkan seberapa besar yang sudah dicapai dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Akan kemana setelah ini bahtera Riau dilayarkan? Pelabuhan mana yang akan disinggahi dan semua penumpang dapatkah menikmati pelayaran itu dengan nyaman dan aman? Masyarakat sebagai penumpang bahtera Riau tentunya ingin berlabuh dari satu dermaga ke dermaga lainnya sembari menimbun bekal untuk pelayaran ke estafet berikutnya termasuk bekal untuk hidup di alam lain setelah tak ada lagi dermaga yang dapat disinggahi di dunia ini.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang mampu dicapai Riau adalah sebuah prestasi. Hanya saja ia tak boleh berdiri sendiri. Bahkan seberapa besar pengorbanan untuk mencapai kinerja itu tak boleh dilupakan. Demikian pula implikasi yang bakal timbul dari naiknya kue-kue ekonomi. Tidak jarang

EDYANUS HERMAN HALIM



nikmat-nikmat ekonomi bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kesengsaraan.

Di Riau, contoh menarik dan mengagetkan dalam dualisme ini dapat ditengarai pada apa yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Beberapa tahun terakhir santer diberitakan bahwa porsi APBD Riau mengucur ke sana paling besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sumber-sumber yang dapat diolah sebagai modal dasar perekonomian juga tersedia cukup banyak. Mulai dari perkebunan, perikanan dan bahkan pertambangan untuk sektor primer dapat diandalkan kompetensinya. Sektor sekunder seperti industri pengolahan dan perdagangan bergerak dinamis untuk mendukung perputaran ekonomi di wilayah itu.

Data Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun perbankan di Indragiri Hilir naik cukup signifikan. Bila pada Triwulan I 2008 baru mencapai Rp 871,255 milyar pada Triwulan I 2009 meningkat menjadi Rp 1,075 triliun. Penyaluran kredit juga berkembang baik. Triwulan I 2008 masih sebesar Rp 885,352 milyar sementara Triwulan I 2009 berkembang menjadi Rp 1,761 triliun. Data ini dapat dipakai guna menunjukkan geliat ekonomi yang meningkat di Indragiri Hilir. Dana APBD yang dimiliki mencapai Rp 873,452 milyar merupakan anggaran yang cukup memadai untuk melakukan pembangunan. Ditambah dengan APBD Provinsi Riau yang mengucur di Indragiri Hilir dan APBN diharapkan pembangunan dapat berjalan optimal. Pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir selama empat tahun terakhir rerata sebesar 8,14 persen.

Kinerja beberapa indikator ekonomi Indragiri Hilir



semang baik dan mungkin spektakuler. Namun dari beberapa berita yang dimuat media cetak membuat bulu kuduk merinding. Sejak awal 2009 kasus asusila yang meliputi pencabulan, perzinahan dan pemerkosaan yang terjadi di Indragiri Hilir mengalami peningkatan. Setiap bulan kasus asusila yang diterima oleh kejaksaan dari kepolisian mencapai 30 kasus, termasuk kasus perkosaan anak di bawah umur (Riau Pos, 30/06/09). Penyakit menular seksual di Indragiri Hilir meningkat 2,96 persen. Kasus HIV/AIDS melonjak sampai 10 persen, penyakit spilis kian membludak mencapai 24 persen (Riau Pos, 10/8/09). Penjalaran kedua penyakit ini sangatlah meluas. Bila ada satu orang yang terjangkit maka sampai 5 orang disekitarnya bisa saja sudah tertular.

Disamping itu penyakit menular lainnya juga merebak di negeri seribu parit ini. Sebanyak 25 anak sekolah dasar tertular TBC (Riau Pos, 8/8/09). Tingkat kematian akibat penyakit menular naik sebesar 1,95 persen. Lebih dari 2500 kasus penyakit menular telah dilaporkan selama tahun 2008 dimana 37 kasus diantaranya telah menyebabkan kematian. Penyakit tertinggi yang menyebabkan kematian di Indragiri Hilir adalah Rabies dimana selama tahun 2008 telah membunuh 73 jiwa. Kasus penyakit saluran pernafasan naik 1,55 persen. Jumlah penderita Hepatitis C meningkat 30 persen dan kasus penyakit kolera mencapai 164 kasus dengan peningkatan sebesar 1,46 persen (Riau Pos, 10/08/09).

Apa yang mesti dicermati di Indragiri Hilir dalam persoalan dualisme kinerja pembangunan seperti diatas. Pertama, wilayah yang demikian luas telah menimbulkan kendala-kendala proses pembangunan yang tak mungkin

EDYANUS HERMAN HALIM



diselesaikan secara teknis. Cakupan pembangunan tak mungkin dapat menjangkau daerah-daerah sulit dengan moda transportasi yang tak memadai. Turunannya adalah kerumitan dalam melakukan pengawasan sehingga kinerja riil dibandingkan kinerja administratif cenderung bias. Skala manfaat pembangunan juga lebih kecil dari apa yang seharusnya diterima masyarakat sehingga daya ungkinnya dalam menaikkan taraf kesejahteraan rakyat sangat kecil.

Kedua, lemahnya pendekatan dalam menentukan prioritas sehingga aspek-aspek yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat untuk hidup layak masih terpinggirkan. Air bersih yang kurang memadai menyebabkan penyakit-penyakit kulit mudah timbul. Lingkungan rumah tangga yang tidak terata dalam perspektif yang lebih sehat belum terbina dalam masyarakat. Ditambah oleh listrik yang minim dan infrastruktur transportasi yang mahal menyebabkan sulitnya melakukan terapi-terapi pembangunan yang lebih optimal.

Ketiga, sistem politik yang kurang mengarah pada pemberdayaan institusi rakyat sehingga kekuatan masyarakat sebagai penyeimbang dari kekuatan pemerintah yang kadang kala berkooptasi dengan pengusaha sangat lemah. Pendidikan politik rakyat tidak diarahkan untuk memberdayakan mereka sehingga kemampuan mereka memperjuangkan hak-hak politik dan ekonomi yang seharusnya mereka dapatkan menjadi terabaikan.

Keluar dari persolan tersebut tidak mudah. Secara kultural dua tampilan yang amat paradoks tersebut seakan hal yang biasa adanya. Faktor geografis mendorong adanya semacam pembenaran-pembenaran bagi kondisi yang



menakutkan ini. Beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar berjangkitnya penyakit malaria di Indragiri Hilir. Sementara secara struktural masalah tersebut dipicu oleh mahalnya sumberdaya aparatur dalam memformulasikan program pembangunan. Sikap mental birokrat yang “berbaju ksamana di laut” tetapi seperti berperilaku “bajak laut” menyebabkan marginalisasi rakyat bukan kian berkurang. Proyek-proyek yang digagas ternyata belum mampu memberi manfaat bagi rakyat.

Solusi yang utama perlu dilakukan salah satunya adalah memecah kabupaten Indragiri Hilir menjadi tiga kabupaten. Hal itu akan memperpendek rentang kendali. Selain itu, meningkatkan distribusi program pembangunan secara merata. Pengawasan yang lebih ketat dan prioritas yang lebih tajam ke arah pemenuhan kebutuhan dinamika masyarakat perlu makin ditingkatkan. Pembinaan kelembagaan rakyat disesuaikan pada upaya memampukan rakyat memahami makna kesejahteraan dan komptabilitas menggapainya secara tanggungrenteng.***

1. Harang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengidentifikasikan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.